

BAB III

PEMBAHASAN

III.1. Identifikasi Penyebab Konflik

Pegunungan Kendeng Utara merupakan kawasan pegunungan berkapur, disebut juga karts, yang membentang dari Kabupaten Tuban hingga Kabupaten Bojonegoro, dan melewati beberapa kabupaten yang lain salah satunya adalah Kabupaten Pati. Kekayaan alam berupa pegunungan karts ini merupakan jenis tanah yang dijadikan sebagai bahan baku utama dalam memproduksi semen. Ketersediaan sumber bahan baku yang melimpah ini kemudian menarik perhatian perusahaan semen besar yang ada di Indonesia untuk mencoba melakukan eksploitasi di wilayah tersebut. Pada Tahun 2010, PT. Indocement Tunggul Prakarsa melalui anak perusahaannya yaitu PT. Sahabat Mulia Sakti (PT. SMS), berniat melakukan investasi di Kabupaten Pati dengan melakukan penambangan dan pendirian pabrik untuk kepentingan produksi semen.

Rencana perusahaan tersebut untuk berinvestasi di Kabupaten Pati pun mendapat sambutan yang positif dari pemerintah setempat. Hal ini dianggap sebagai peluang bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian. Pemerintah daerah juga memfasilitasi perusahaan tersebut untuk berdiskusi dengan para stakeholder serta masyarakat. Akan tetapi sikap pemerintah ini tidak sejalan dengan kehendak rakyat. Mayoritas warga yang lokasinya akan menjadi tempat proses penambangan dan juga pendirian pabrik, menolak kembali rencana tersebut.

Sebelum PT. Sahabat Mulia Sakti berniat untuk melakukan kegiatan penambangan, pada Tahun 2009 masyarakat baru saja memenangkan gugatan di pengadilan atas perusahaan semen lain yang memiliki niat sama, yaitu melakukan kegiatan penambangan dan mendirikan pabrik semen. Perbedaannya adalah pada lokasi yang akan digunakan untuk proyek tersebut. Jika PT. Semen Gresik berencana melakukan penambangan di Kecamatan Sukolilo. Sedangkan PT. Sahabat Mulia Sakti berlokasi di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen.

Adanya benturan kepentingan yang berbeda kemudian memicu konflik di antara masyarakat yang kontra, pihak perusahaan dan juga pemerintah daerah. Untuk memudahkan dalam pemetaan konflik, maka diperlukan langkah identifikasi penyebab konflik. Adapun hasil identifikasi penyebab konflik semen di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya benturan kepentingan yang berbeda-beda di antara para aktor utama yang terlibat konflik.

Adanya benturan antar kepentingan yang berbeda-beda di antara para aktor utama mengakibatkan tidak tercapainya titik temu dalam persoalan ini, sehingga membuat konflik semakin berkembang luas. Pihak perusahaan semen memandang bahwa kawasan karts di Kabupaten Pati merupakan sumber bahan baku yang melimpah untuk memproduksi semen. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan semen dalam negeri demi menunjang pembangunan infrastruktur. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sendiri menilai bahwa hal ini merupakan kesempatan bagi daerah untuk dapat meningkatkan perekonomian.

Terlebih bagi masyarakat sekitar lokasi penambangan, dengan harapan terserapnya tenaga kerja dan mengangkat perekonomian warga setempat.

Sedangkan bagi masyarakat, yang menamakan diri sebagai Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, rencana pihak perusahaan merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup warga. Hal ini dikarenakan sebagian besar warga setempat menggantungkan hidupnya dari bertani dan bercocok tanam di sekitar lereng Pegunungan Kendeng Utara. Selain itu muncul kekhawatiran dari masyarakat mengenai ketidakpastian dampak ekonomi seperti, kesempatan kerja, peluang usaha, serta terwujudnya kesejahteraan. Kemudian isu lingkungan menjadi alasan penting bagi masyarakat kontra yang dimotori oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), seperti kekhawatiran akan hilangnya sumber mata air bersih, polusi udara dan polusi suara akibat proses penambangan yang akan berdampak pada kesehatan.

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati mencatat bahwa, pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan 35 persen dari total lahan pertanian di Kabupaten Pati berada di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Dua kecamatan tersebut merupakan calon lokasi penambangan. Hal ini dapat mencederai semboyan Kabupaten Pati sendiri, yaitu Bumi Mina Tani. Sebuah semboyan yang menunjukkan cita-cita Kabupaten Pati sebagai lumbung pangan.

Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Pertanian Dalam PDRB Kabupaten Pati

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah	35,45%	36,17%	36%	35,92%	35,28%

Sumber : <http://www.patikab.go.id/v2/id/2015/05/19/ekonomi-kabupaten-pati-selama-5-tahun-terakhir-tumbuh-fluktuatif/>

2. Sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang kurang transparan dan lebih mendukung pabrik semen daripada masyarakat.

Konflik yang sebelumnya pernah terjadi, telah membentuk kekuatan yang ada di masyarakat untuk menolak ancaman industrialisasi yang dilakukan oleh perusahaan semen. Sehingga membuat masyarakat kembali menolak rencana yang dimunculkan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dinilai tidak transparan kepada masyarakat perihal rencana pembangunan pabrik semen. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan akses informasi yang aktual tentang rencana pabrik semen tersebut. Sikap pemerintah yang bertolak belakang dengan masyarakat kontra juga turut berkontribusi menyebabkan konflik tidak kunjung selesai. Akibatnya masyarakat menjadi kurang percaya terhadap kredibilitas pemerintah daerah.

3. Tindakan sembunyi-sembunyi dari pihak perusahaan.

Disamping kurangnya transparansi, baik dari pemerintah daerah maupun pihak perusahaan, ternyata banyak aktifitas yang dilakukan secara diam-diam oleh pihak perusahaan semen tersebut, yang dinilai masyarakat tidak *kulo*

nuwun atau tidak permisi. Misalnya sudah melakukan sosialisasi kepada warga di saat Perda RTRW yang baru belum disahkan. Dalam sosialisasi tersebut juga telah menyinggung persoalan harga tanah. Bahkan Direktur PT. Sahabat Mulia Sakti berujar bahwa masyarakat sudah setuju dan bersiap untuk bedol desa. Sedangkan saat dikonfirmasi, salah satu anggota JMPPK yang mendatangi warga mengatakan bahwa mayoritas warga setempat menolak rencana tersebut.

4. Adanya bentrokan dengan preman-preman yang menghadang warga ketika akan melakukan aksi jalan kaki menuju Alun-Alun Kota Pati.

Hal selanjutnya yang turut menjadikan intensitas konflik semen menjadi semakin tinggi adalah ketika warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) akan melakukan aksi jalan kaki menuju Alun-Alun Kota Pati yang kemudian dihadang oleh beberapa preman di Pasar Kayen. Preman-preman tersebut disinyalir merupakan orang-orang suruhan dari pihak perusahaan. Sebelumnya pihak kepolisian sudah menghimbau warga untuk tidak melanjutkan aksinya sampai ke pusat kota untuk menghindari bentrokan. Akan tetapi himbauan tersebut diabaikan oleh masyarakat sehingga hampir terjadi baku hantam ketika mereka berhadapan dengan preman-preman tersebut. Setelah pihak kepolisian ikut turun tangan akhirnya warga bisa melanjutkan aksinya sampai ke pusat kota.

III.2. Pengklasifikasian Konflik

Menurut Wirawan (2010 : 62), dalam bidang kehidupannya, suatu jenis konflik tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan. Wirawan (2010 : 63-81) kemudian mengklasifikasikan konflik ke dalam beberapa jenis konflik berdasarkan aspek kehidupan, seperti konflik ekonomi, konflik bisnis, konflik politik, konflik agama, konflik sosial dan konflik budaya. Sesuai dengan penjelasan tersebut, konflik semen yang melibatkan masyarakat pro dan kontra, pihak perusahaan/swasta dan juga pemerintah ini dapat juga dikategorikan sebagai konflik ekonomi, politik dan juga sosial.

1. Konflik Ekonomi

Menurut Wirawan (2010 : 63), konflik ekonomi dapat terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Masyarakat modern menghadapi persoalan pada terbatasnya sumber-sumber penghidupan. Jumlah manusia yang terus berkembang lebih cepat, tidak sebanding dengan perkembangan sumber-sumber daya yang mereka butuhkan. Dalam konflik semen ini, masyarakat kontra berusaha mempertahankan sumber-sumber penghidupannya berupa lahan pertanian. Sedangkan pihak perusahaan berusaha menguasai sumber-sumber penghidupan tersebut untuk kegiatan penambangan batu lempung dan batu gamping untuk memproduksi semen.

2. Konflik Politik

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah, memiliki peran penting dalam menjadikan persoalan semen bernuansa politik. Pemerintah daerah memandang bahwa adanya pabrik semen di Kabupaten Pati merupakan investasi yang bagus untuk jangka panjang. Sehingga melalui kekuasannya, pemerintah berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung rencana pabrik semen tersebut. Hal ini kemudian bertolak belakang dengan sikap masyarakat yang menolak rencana tersebut. Pemerintah dianggap tidak mengindahkan aspirasi rakyat yang menentang adanya pabrik semen karena dianggap dapat mengancam kelangsungan hidup mereka, khususnya para petani, hingga anak cucunya kelak.

3. Konflik Sosial

Konflik yang tidak kunjung menemui solusi, turut berkontribusi menciptakan skat-skat di antara masyarakat itu sendiri. Konflik berubah menjadi konflik sosial mana kala terdapat dua kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda dengan adanya pabrik semen. Perbedaan karakteristik dan kondisi perekonomian turut berpengaruh terhadap pandangan kedua kelompok masyarakat tersebut. Kondisi yang demikian dapat mengakibatkan dampak sosial yang luas berupa retaknya keharmonisan hubungan di masyarakat yang selama ini telah terjaga.

III.3. Identifikasi Aktor Serta Kepentingan Yang Melatarbelakangi

Identifikasi aktor terhadap pihak-pihak yang berkonflik, merupakan langkah penting dalam menganalisis sebuah konflik. Melalui identifikasi aktor inilah dapat dipetakan siapa saja yang terlibat konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari golongan masyarakat, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga hukum, instansi pemerintah, lembaga swasta dan sebagainya. Meskipun dari berbagai aktor yang terlibat konflik memiliki kontribusi langsung maupun tidak langsung, tetap saja semua aktor tersebut memiliki pengaruh terhadap konflik.

Di samping itu, identifikasi kepentingan para aktor dimaksudkan agar pemetaan konflik menjadi kian jelas. Kepentingan masing-masing aktor secara umum dilatarbelakangi oleh landasan atau prinsip yang selama ini dipegang, atau dengan kata lain unsur kepentingan itu juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana para aktor tersebut berada. Misalnya dalam lingkungan pemerintahan, tujuan pokoknya adalah pembangunan wilayah melalui program kerja yang sudah ditetapkan.

Sedangkan dalam lingkungan perusahaan swasta yang bergerak di bidang produksi barang atau jasa, unsur yang harus dipenuhi adalah pada profit dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Sementara pada masyarakat lebih berpegang teguh pada peningkatan kesejahteraan hidup melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya. Aktor yang terlibat dalam konflik sangatlah beragam, dengan lingkungan kerja yang berbeda-beda pula. Sehingga tidak

menutup kemungkinan unsur kepentingan dalam konflik pabrik semen ini juga beragam. Berikut akan dijelaskan mengenai pemetaan aktor-aktor utama serta berbagai kepentingan yang melatarbelakangi para aktor utama tersebut:

1. PT. Sahabat Mulia Sakti

PT. Sahabat Mulia Sakti atau sering disingkat menjadi PT. SMS merupakan anak perusahaan dari PT. Indocement yang bergerak di bidang penambangan batu gamping dan batu lempeng untuk memproduksi semen. Perusahaan ini berencana mendirikan pabrik semen serta melakukan kegiatan penambangan di wilayah Kabupaten Pati yang memiliki sumber daya alam berupa karts yang terdapat di Pegunungan Kendeng Utara sebagai bahan baku untuk memproduksi semen.

Wilayah yang akan dijadikan lokasi pembangunan pabrik berada di Desa Tambakromo, Desa Mojomulyo, Desa Larangan dan Desa Karangawen (Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati). Sedangkan untuk lokasi penambangan batu gamping berada di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Disebutkan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti memiliki kapasitas produksi sebesar 3,84 juta ton per tahun (tahun pertama hingga tahun keempat). Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya direncanakan kapasitas produksi dapat meningkat hingga dua kali lipatnya. Pendirian pabrik sendiri rencananya memiliki luas sekitar 180 hektare, terdiri atas tapak pabrik dan *buffer zone* seluas 143,22 hektare, jalan produksi 20,14 hektare, lokasi perkantoran 16,64 hektare. Untuk luas wilayah

penambangannya sebesar 2.025 hektare untuk batu gamping, dan 663 hektare untuk batu lempung yang berlokasi di dua kecamatan tersebut. (diunduh dari <http://jateng.tribunnews.com/2014/08/18/ini-profil-pabrik-semen-akan-menambang-di-gunung-kendeng-pati>).

Pemerintah Indonesia memandang semua potensi sumber daya alam melimpah yang dimiliki sebagai modal dalam usaha meningkatkan pendapatan negara. Caranya yaitu dengan mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, baik dari sektor kehutanan, pertambangan, kelautan dan sebagainya. Dalam konteks tersebut, maka pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan produksi dan distribusi pelayanan dan jasa, seperti pelabuhan, bandara, jalan, gedung, sarana kesehatan dan sebagainya. Berikut akan dijabarkan kepentingan-kepentingan yang melatarbelakangi PT. Sahabat Mulia Sakti untuk melakukan kegiatan penambangan di Kabupaten Pati.

a). Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan semen salam negeri

Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk, maka kebutuhan akan pembangunan infrastruktur juga meningkat. Indonesia yang terus melakukan pembangunan tersebut membutuhkan semen sebagai material konstruksi selain pasir dan kerikil. Ditambah dengan adanya program percepatan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, menjadikan kebutuhan akan material konstruksi, terutama semen, menjadi meningkat. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi kepentingan PT. Indocement Tunggal Prakarsa melalui anak perusahaannya untuk mencoba

berinvestasi di Kabupaten Pati sebagai wilayah yang mempunyai bahan baku melimpah untuk memproduksi semen.

Berbeda dengan PT. Semen Gresik, kali ini rencana pendirian pabrik semen tidak berada di Kecamatan Sukolilo, akan tetapi berada di dua kecamatan sekaligus, yaitu di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Wilayah yang akan dijadikan lokasi pembangunan pabrik berada di Desa Tambakromo, Desa Mojomulyo, Desa Larangan dan Desa Karangawen (Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati). Sedangkan untuk lokasi penambangan batu gamping berada di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Disebutkan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti memiliki kapasitas produksi sebesar 3,84 juta ton per tahun (tahun pertama hingga tahun keempat). Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya direncanakan kapasitas produksi dapat meningkat hingga dua kali lipatnya.

b). Wilayah Pati Selatan dipilih karena berdekatan dengan sumber bahan baku

Sebagai perusahaan swasta yang berorientasi pada profit, sudah sewajarnya pihak perusahaan berusaha untuk menekan biaya produksi akan tetapi tetap menghasilkan produk yang berkualitas. Hal ini juga yang sedang dilakukan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, meskipun PT. Indocement Tunggal Prakarsa sebagai induk perusahaan telah memiliki beberapa pabrik di wilayah lain. Salah satu upaya untuk menekan biaya produksi adalah dengan cara mendirikan pabrik yang berlokasi tidak jauh dari sumber bahan baku

utama. Hal ini kemudian melatarbelakangi mengapa PT. Sahabat Mulia Sakti berniat untuk mendirikan pabrik semen di wilayah Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen yang notabennya berdekatan dengan Pegunungan Kendeng yang memiliki sumber bahan baku melimpah.

2. Masyarakat

Masyarakat yang terlibat konflik sebagian besar berasal dari wilayah yang terkena dampak langsung pembangunan pabrik semen, yaitu dari Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen ditambah dengan warga dari Kecamatan Sukolilo yang dulu pernah menjadi calon lokasi penambangan oleh PT. Semen Gresik. Aktor dari elemen masyarakat ini terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok warga pro dan warga kontra serta sebagian kecil bersikap netral.

a). Kelompok Masyarakat Pro

Kelompok masyarakat pro pabrik semen adalah warga yang mendukung dan menginginkan adanya pembangunan pabrik semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti di wilayah mereka. Selain dari warga sekitar yang terkena dampak langsung pembangunan, kelompok pro pabrik semen ini ada pula yang berasal dari luar wilayah dan bertempat tinggal jauh dari lokasi pabrik.

Potensi tersedianya lapangan pekerjaan di pabrik semen menjadi alasan bagi warga yang pro untuk mendukung berdirinya pabrik semen,

karena berdasarkan pemahaman mereka dengan adanya pabrik semen maka orang-orang sekitar akan dipekerjakan oleh pihak pabrik. Sekalipun ada anggota masyarakat yang pro terhadap pembangunan pabrik semen, jumlah mereka sangatlah sedikit apabila dibandingkan dengan kelompok masyarakat kontra. Adapun kepentingan yang melatarbelakangi masyarakat mendukung adanya pabrik semen adalah sebagai berikut:

a. Peluang terbukanya lapangan pekerjaan

Dukungan yang diberikan oleh kelompok masyarakat ini tidak lain disebabkan oleh harapan terbukanya lapangan pekerjaan dan juga peluang usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat di sekitar lokasi pabrik. Contoh kecil misalnya peluang usaha untuk mendirikan warung makan. Warga yang pro beranggapan bahwa, dengan adanya pabrik semen di wilayah mereka, akan menarik minat banyak orang dari luar wilayah untuk berdatangan. Karena nantinya peluang terbukanya lapangan pekerjaan tidak hanya diminati oleh masyarakat sekitar, tetapi juga akan menarik minat dari warga yang bertempat tinggal jauh dari lokasi pabrik.

b. Harapan untuk memperbaiki kondisi perekonomian

Apabila disimpulkan, sikap pro yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat hanya menilai keuntungan dari sisi ekonomis semata yang dapat mereka peroleh dengan adanya pabrik semen. Pihak dari kelompok masyarakat kontra juga menganggap bahwa, kelompok masyarakat pro

hanya memikirkan dari segi materiilnya saja, tidak berpikir jauh tentang segala aspek, khususnya lingkungan dan juga masa depan anak cucu mereka kelak.

b). Kelompok Masyarakat Kontra

Kelompok masyarakat kontra adalah mereka yang secara tegas menolak adanya rencana pembangunan pabrik semen di wilayahnya. Apabila dilihat dari berbagai aksi yang sering dilakukan, anggota masyarakat kontra memiliki massa yang lebih besar daripada masyarakat yang pro. Hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan adanya kontribusi warga dari Kecamatan Sukolilo yang kekuatannya sudah lama terbentuk sejak melakukan gerakan penolakan terhadap PT. Semen Gresik. Kebencian terhadap pabrik semen sudah tertanam kuat sejak berkonflik dengan PT. Semen Gresik, sehingga ketika ada kejadian serupa terulang oleh PT. SMS, maka masyarakat kontra akan melakukan gerakan penolakan yang sama.

Kelompok masyarakat kontra juga selalu proaktif dalam menanggapi berbagai wacana dan agenda yang berkaitan dengan pabrik semen. Selain bergabung dengan sesama warga kontra, dengan kesukarelaannya mereka juga tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), ataupun mendirikan komunitas/paguyuban sendiri untuk mengakomodasi suara mereka dalam menolak pabrik semen. Tidak hanya proaktif, warga yang kontra juga seringkali mendapatkan undangan dari

instansi pemerintahan untuk menghadiri agenda kegiatan yang berkaitan dengan pabrik semen, seperti audiensi.

Sikap kontra yang ditunjukkan oleh masyarakat dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang cukup kuat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa masyarakat bersikap kontra terhadap rencana pabrik semen.

a. Mempertahankan sumber penghidupan dari sektor pertanian

Sebagian besar warga setempat menggantungkan hidupnya dari bertani dan bercocok tanam di sekitar lereng Pegunungan Kendeng. Komoditas utamanya adalah padi dan jagung serta hasil palawija dan juga buah-buahan seperti durian. Selain itu, masyarakat setempat juga bekerja sama dengan pihak Perhutani dalam memanfaatkan lahan di lereng Pegunungan Kendeng. Sehingga tidak semua warga memiliki lahan milik pribadi. Ada timbal balik dalam kerja sama yang dilakukan oleh warga dengan Perhutani. Warga dapat menggunakan lahan untuk bertani, tetapi juga membantu dalam pelestarian lingkungan dengan cara penanaman bibit pohon kembali.

Di samping itu, sektor pertanian juga berkontribusi besar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan 35 persen dari total lahan pertanian di Kabupaten Pati berada di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Hal ini menjadikan Kabupaten Pati sebagai lumbung pangan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga sebagai perwujudan slogan Kabupaten Pati yang selama ini sudah melekat, yaitu

Bumi Mina Tani. Sehingga amat disayangkan apabila lahan-lahan pertanian ini diubah menjadi lokasi pertambangan dan mengurangi produksi pada sektor pertanian. Koordinator dari JMPPK juga berujar bahwa, upaya mempertahankan sumber-sumber penghidupan bagi petani sebagai langkah untuk mendukung misi Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu terwujudnya kedaulatan pangan.

- b. Ketidakpastian nasib masyarakat setempat apabila dibangun pabrik semen

Ada kekhawatiran dari masyarakat mengenai ketidakpastian dampak ekonomi seperti, kesempatan kerja, peluang usaha, serta terwujudnya kesejahteraan. Pihak perusahaan memang memberikan iming-iming atau janji berupa terserapnya tenaga kerja dalam proyek tersebut. Munculnya ketidakpastian dikarenakan proses penyerapan tenaga kerja tersebut dibagi atas beberapa proyek kerja yang sifatnya sementara, seperti pada pra konstruksi pabrik. Masyarakat khawatir selepas dalam proyek pembangunan konstruksi pabrik, tidak ada kejelasan tentang peluang kerja selanjutnya. Alasan-alasan tersebut kemudian melatarbelakangi kepentingan kelompok masyarakat kontra untuk menolak adanya pabrik semen di wilayah mereka.

c). Kelompok Masyarakat Netral

Selain terdapat kelompok masyarakat pro dan kontra dengan adanya rencana pendirian pabrik semen, di antara kedua kelompok masyarakat tersebut juga terdapat segelintir warga yang bersikap netral atau tidak memihak dengan rencana tersebut. Warga yang memilih bersikap netral menganggap apapun keputusan yang dicapai nantinya, selama itu baik untuk masyarakat dan lingkungan akan didukung. Sikap netral ini juga disebabkan karena warga enggan untuk ikut terlibat ke dalam konflik, atau tidak mengikuti informasi yang berkembang sehingga memilih untuk diam.

Apabila dilihat dari segi perekonomian, sebagian anggota dari kelompok masyarakat netral juga tergolong cukup mapan. Sehingga dengan ada atau tidak adanya pabrik semen, tidak akan cukup berpengaruh terhadap kondisi perekonomian keluarganya. Mereka hanya menginginkan yang terbaik bagi daerahnya. Apakah itu dengan atau tanpa adanya pabrik semen. Sikap yang demikian dari warga yang netral seringkali menjadi bahan pembicaraan dari kelompok masyarakat kontra karena bersikap acuh, serta tidak jarang dianggap mendukung rencana pendirian pabrik semen.

3. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng

JMPPK merupakan sebuah komunitas lokal di Kabupaten Pati yang terbentuk karena adanya kesadaran dan kepentingan yang sama untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Komunitas ini digagas oleh seorang berinisial GRN yang dulunya tergabung dalam komunitas Serikat Petani Pati (SPP) di

wilayahnya. Alasan dasar untuk membentuk JMPPK ialah dikarenakan komunitas Serikat Petani Pati hanya berfokus pada persoalan pertanian saja, tidak menyangkut dengan lingkungan. Selain itu, terbentuknya komunitas ini juga sebagai respon atas konflik yang pernah terjadi dengan perusahaan semen sebelumnya.

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau disingkat JMPPK dapat dikatakan sebagai pelopor gerakan tolak pabrik semen. Hal ini sudah dimulai sejak berkonflik dengan PT. Semen Gresik. Kemudian berlanjut ketika berhadapan dengan pabrik semen yang lain, yaitu PT. Sahabat Mulia Sakti. Pada mulanya anggota JMPPK sebagian besar berasal dari Kecamatan Sukolilo dan juga dari anggota Sedulur Sikep atau Orang Samin. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip hidup Orang Samin salah satunya yaitu mencintai lingkungan dan hidup berdaulat dengan mencukupi kebutuhan hidup secara mandiri, yang berarti harus bercocok tanam atau bertani.

Sebagai salah satu aktor utama dalam konflik semen di Kabupaten Pati, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng memiliki dasar kepentingan untuk memilih bersikap kontra. Beberapa kepentingan yang mendasari sikap JMPPK adalah sebagai berikut:

- a. Mempertahankan sumber penghidupan dari sektor pertanian

Prinsip yang sudah dipegang teguh Orang Samin secara turun temurun, menjadikan sebagian besar anggota usia tidak produktif dari komunitas adat tersebut berprofesi tidak jauh sebagai seorang petani. Lahan

yang digarap juga berlokasi di lereng Pegunungan Kendeng itu sendiri dimana mereka berdomisili. Hal ini merupakan akar awal munculnya gerakan tolak pabrik semen, yaitu untuk mempertahankan sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Dari hasil pengamatan di kawasan Pegunungan Kendeng, banyak dijumpai tanaman-tanaman sela berupa jagung, durian, ketela dan sebagainya yang merupakan komoditas hasil pertanian oleh warga Kendeng yang memanfaatkan lahan di Pegunungan Kendeng Utara.

- b. Melindungi kawasan Pegunungan Kendeng Utara dari ancaman kerusakan lingkungan akibat penambangan

Isu lingkungan menjadi alasan penting bagi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dalam menolak adanya pabrik semen, seperti kekhawatiran akan hilangnya sumber mata air bersih, polusi udara dan polusi suara akibat proses penambangan yang akan berdampak pada kesehatan. Berdasarkan keterangan dari ahli speleologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Rahmadi, kegiatan penambangan semen di Pegunungan Karst Kendeng Utara berpotensi memutus fungsi karst sebagai pendistribusi air melalui gua. Jika distribusi air terputus, maka dapat menyebabkan mata air hilang dan pemulihannya sangat sulit karena kawasan karst merupakan bentang alam di batuan mudah larut seperti batu gamping (diunduh dari www.liputan6.com). Dijelaskan lebih lanjut oleh anggota Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut,

“Karst memiliki jaringan gua sebagai pipa air alami yang menghubungkan zona resapan, zona simpanan, dan mata air yang penting bagi masyarakat di kawasan setempat. Aktivitas penambangan bakal menghilangkan lapisan tanah pucuk dan lapisan epikarst (karst permukaan) serta akan memutus jaringan air bawah tanah. Sehingga akan menyebabkan fungsi karst sebagai akuifer air bersih bagi masyarakat sekitar menjadi hilang.”

c. Mengusahakan agar Pegunungan Kendeng Utara ditetapkan sebagai Kawasan Geologis

Berbekal dengan pengalaman konflik dengan PT. Semen Gresik, dan juga semakin meluasnya jaringan yang dibangun, maka kemudian alasan gerakan tolak pabrik semen bukan hanya sebatas pada mempertahankan sumber penghidupan saja, tetapi juga menyangkut hal-hal penting lainnya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan oleh JMPPK.

Dalam perjalanannya sebagai pelopor gerakan tolak pabrik semen yang selalu proaktif, JMPPK telah membangun relasi yang luas. Hal ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyerap pengetahuan dari relasi yang telah dijalin, seperti dengan Wahana Lingkungan Hidup Jawa Tengah, Lembaga Bantuan Hukum dan sebagainya. Sehingga kemudian ini membuka sudut pandang lain dari JMPPK terhadap konflik yang berlangsung. Tuntutan yang diajukan, baik kepada pemerintah dan juga pihak perusahaan, bukan hanya sebatas untuk membatalkan pendirian pabrik di lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

JMPPK yang selalu proaktif dalam berbagai agenda yang berkaitan dengan pabrik semen, juga menyuarakan kepada Lembaga Legislatif Kabupaten Pati dalam rapat dengar pendapat, untuk mengubah status kawasan Pegunungan Kendeng sebagai kawasan Geologi. Berbagai masukan telah disampaikan dalam rapat tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan sama sekali oleh Lembaga Legislatif dalam menetapkan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang baru. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh JMPPK dan juga masyarakat kontra semata-mata untuk memastikan bahwa Pegunungan Kendeng tetap lestari serta wilayah mereka tidak akan dijadikan sebagai lokasi pabrik semen dan kegiatan penambangan.

d. Aksi solidaritas antarsesama masyarakat di Pati Selatan

Konflik dengan PT. Sahabat Mulia Sakti yang memiliki tujuan lokasi berbeda dibanding perusahaan sebelumnya, turut menggugah rasa solidaritas anggota JMPPK untuk membantu sesama warga yang berdomisili di lokasi calon tapak pabrik. Atas dasar tersebut, JMPPK juga memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi perihal pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan di Pegunungan Kendeng. Oleh sebab itu, antara kelompok masyarakat kontra dengan JMPPK memiliki satu visi yang sama dalam gerakannya menolak pabrik semen karena satu sama lain saling berpengaruh.

4. Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan aktor pemegang kekuasaan dan kewenangan terhadap wilayah yang dikelolanya. Konflik semen di Kabupaten Pati tidak terlepas dari pengaruh pemerintah itu sendiri, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Akan tetapi yang mendapatkan perhatian lebih adalah pada tingkat kabupaten, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sebagai institusi atau pihak yang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan bagi kemajuan daerahnya melalui berbagai program yang telah dicanangkan.

Bupati Pati bersama dengan DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan peraturan dan arah kebijakan yang berkaitan dengan Pegunungan Kendeng. Diantara keputusan yang telah dibuat yaitu DPRD Kabupaten Pati melalui sidang paripurna pada tanggal 2 Maret 2011, menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) tahun 2010-2030. Hasil sidang tersebut menghasilkan putusan perubahan fungsi Pegunungan Kendeng yang seharusnya untuk pertanian dan pariwisata, diubah menjadi kawasan pertambangan seperti di tiga kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo. Padahal, belum ada bukti konkrit daya dukung dan daya tampung untuk mengubah dengan dialihfungsikannya kawasan pertanian menjadi kawasan industri dan pertambangan.

Kebijakan untuk mengubah perda tata ruang ini merupakan bentuk pelajaran dari masa lalu, dimana pada saat PT. Semen Gresik berencana

mendirikan pabrik semen, tidak didukung oleh kebijakan tata ruang yang ada di Kabupaten Pati. Sehingga ketika PT. Sahabat Mulia Sakti memiliki rencana yang sama untuk mendirikan pabrik semen, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengubah perda tata ruang dengan maksud untuk memudahkan, dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pendirian pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng.

Munculnya kebijakan desentralisasi kemudian memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Salah satu upaya untuk mengembangkan suatu daerah adalah dengan cara membuka peluang bagi pihak luar untuk berinvestasi. Investasi merupakan kegiatan penanaman modal dalam suatu proyek kerja oleh pihak luar dengan tujuan agar memberikan keuntungan, baik bagi daerah yang bersangkutan dan pihak investor itu sendiri.

Berikut adalah kepentingan yang melatarbelakangi sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Pati mendukung rencana pendirian pabrik semen di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen:

a. Menciptakan iklim investasi yang bagus untuk Kabupaten Pati

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati melihat rencana PT. Sahabat Mulia Sakti untuk melakukan penambangan dan pembangunan pabrik semen merupakan investasi yang bagus bagi daerah. Dengan menciptakan iklim investasi yang bagus, di masa yang akan datang diharapkan akan ada lebih banyak pihak yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pati.

Sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian. Pemerintah berharap dengan adanya investasi pabrik semen ini dapat mengurangi berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Pati. Misalnya, mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan meningkatnya PAD diharapkan mampu mengatasi persoalan yang lain, seperti memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal beserta sumber daya manusianya. Memperbaiki infrastruktur yang belum atau kurang memadai dan sebagainya.

b. Menyerap tenaga kerja sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran

Adanya investasi pabrik semen diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Pati. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, harapan pemerintah adalah dapat mengurangi angka kemiskinan sehingga tingkat perekonomian menjadi naik. Lebih jauh, bagi pemerintah yang terpenting adalah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

Tabel 3.2 Angka Kemiskinan Kabupaten Pati

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Kemiskinan	14,48	14,69	13,61	12,94	12,06

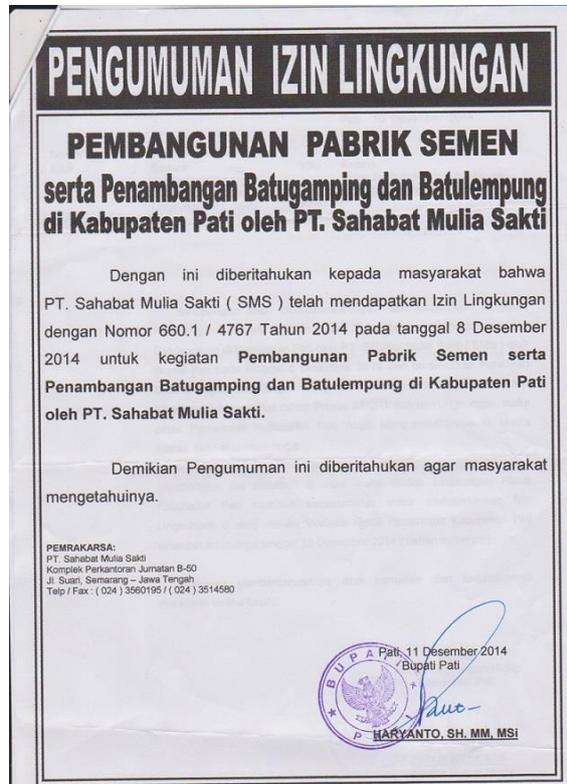
Sumber : <http://patikab.bps.go.id>

Beberapa alasan tersebut kemudian melatarbelakangi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk mendukung adanya pabrik semen di

Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Dukungan ini diwujudkan dalam berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar kepentingan tersebut dapat tercapai. Salah satu kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah yaitu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) tahun 2010-2030.

Hasil sidang penetapan tersebut menghasilkan putusan perubahan fungsi Pegunungan Kendeng yang seharusnya untuk pertanian dan pariwisata, diubah menjadi kawasan pertambangan seperti di tiga kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo. Padahal, belum ada bukti konkrit daya dukung dan daya tampung untuk mengubah dengan dialihfungsikannya kawasan pertanian menjadi kawasan industri dan pertambangan. Selain itu, kebijakan lain yang sempat dikeluarkan oleh pemerintah yaitu mengeluarkan surat izin lingkungan yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup pada saat sebagian besar masyarakat masih menolak adanya pabrik semen.

Gambar 3.1 Surat Izin Lingkungan yang dikeluarkan Bupati Pati



Sumber : www.patkab.go.id

5. Aktor Lain

Dalam pembahasan aktor atau pihak yang terlibat dalam konflik semen di Kabupaten Pati, sesuai dengan topik penelitian, penulis hanya membatasi pada empat aktor tersebut dan secara khusus pada Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Akan tetapi diluar itu, konflik yang terjadi ini hampir melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat kontra yang tempat tinggalnya akan dijadikan lokasi tapak pabrik, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, SKPD terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, Bappeda, sampai ke pemerintahan tingkat kecamatan dan desa, organisasi lingkungan

Walhi Jawa Tengah, Perhutani, mahasiswa, akademisi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Pemuda Anshor Tambakromo dan juga para LSM yang ada di Pati, seperti LSM Pengawasan Kebijakan Publik, HIPPSI, Aktifis Pemuda Guyangan (Afsagan), Gema Reformasi Pati (Gerpa) dan beberapa lainnya. Semua pihak-pihak tersebut turut berkontribusi terhadap berlangsungnya konflik pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Hanya saja dalam penelitian ini tidak akan dijelaskan secara lebih lanjut.

III.4. Peran Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng

Perlawanan rakyat Kendeng yang menamakan diri sebagai Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau disingkat JMPPK, telah dimulai sejak 2008 ketika muncul ancaman industrialisasi oleh perusahaan semen milik negara. Perlawanan yang terus digerakkan akhirnya membuahkan hasil dengan kemenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jawa Tengah, pada tahun 2010. Akan tetapi tidak berselang lama, pada tahun yang sama wacana pendirian pabrik semen dimunculkan kembali oleh perusahaan semen yang lain, kali ini oleh pihak swasta.

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng tidak patah semangat, mereka adalah pihak yang paling proaktif menolak adanya rencana pendirian pabrik semen tersebut. Bersama dengan masyarakat kontra yang lain, JMPPK melakukan berbagai upaya penolakan untuk memastikan bahwa pabrik semen tidak jadi dibangun, dan menjaga agar lingkungan mereka serta Pegunungan Kendeng Utara tetap aman dan lestari. Dari hasil pengamatan di lapangan ketika

terjadi aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, semangat perlawanan rakyat Kendeng atau JMPPK juga dituangkan ke dalam sebuah “*tembang jawa*” yang dipadukan dengan kalimat sholawat.

“Ibu Bumi Wis Maringi

Ibu Bumi Dilarani

Ibu Bumi Kang Ngadili . . .”

Kalimat awal dapat diartikan sebagai bumi atau alam yang sudah memberi. Memberi di sini diartikan dengan berbagai kekayaan alam yang telah diberikan kepada manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Sedangkan kalimat kedua dimaknai sebagai bumi atau alam yang sudah disakiti. Artinya adalah banyak manusia tidak bertanggung jawab yang telah banyak melakukan kerusakan terhadap alam. Penebangan liar, membuang sampah sembarangan, penambangan liar, pembakaran hutan untuk membuka lahan baru dan sebagainya. Pada kalimat ketiga diartikan bahwa, sebagai akibat dari ulah perbuatan manusia yang melakukan kejatahan lingkungan, maka bumi atau alam akan memberikan hukuman dengan mendatangkan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan dan sebagainya.

Tembang atau lagu tersebut selalu menjadi pembuka bagi JMPPK dalam melakukan berbagai aksi guna menolak rencana pendirian pabrik semen. Anggota aksi yang terdiri dari para pemuda, bapak-bapak dan ibu-ibu menyanyikan bersama lagu tersebut sebagai perwujudan aspirasi mereka. Dalam kurun waktu

antara Tahun 2010, ketika wacana pendirian pabrik semen muncul kembali oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, berbagai macam aksi tolak pabrik semen telah dilakukan oleh masyarakat, hingga pada Tahun 2015 JMPPK akhirnya berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang. Berbagai macam aksi dan gerakan mengawal konflik semen yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menunjukkan peran komunitas tersebut dalam mewujudkan misinya melestarikan Pegunungan Kendeng Utara. Rangkuman atas peran apa saja yang telah dilakukan oleh JMPPK akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Aktif melakukan sosialisasi dan kampanye tolak pabrik semen

Sebagai kelompok masyarakat yang memiliki fokus pada pelestarian lingkungan, khususnya di Pegunungan Kendeng Utara, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) selalu aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan edukasi seputar informasi geografis Pegunungan Kendeng Utara kepada masyarakat. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga serta melestarikan lingkungan. Lingkungan yang baik akan memberikan manfaat yang baik pula bagi masyarakat apabila dikelola dengan bijak, sehingga perlu adanya pelestarian lingkungan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) juga sekaligus menyampaikan kepada masyarakat akan bahaya kerusakan lingkungan, dampak negatif dalam jangka panjang apabila

pendirian pabrik semen jadi dilakukan. Sosialisasi maupun kampanye tolak pabrik semen yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dilakukan ke dalam berbagai tindakan, antara lain akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Melakukan orasi

Dalam berbagai aksi gerakan tolak pabrik semen, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) selalu memberikan orasi yang berisi ajakan untuk melestarikan lingkungan Pegunungan Kendeng Utara serta menunjukkan sikap penolakan terhadap segala bentuk eksploitasi kawasan Pegunungan Kendeng Utara, termasuk rencana pendirian pabrik semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, karena dinilai memiliki dampak negatif dalam jangka panjang yang dapat ditimbulkan.

b. Kampanye melalui media sosial

Sebagai masyarakat umum yang melek teknologi, anggota dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) juga memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram sebagai media untuk menyuarakan penolakan terhadap pabrik semen. Di samping itu, JMPPK bekerja sama dengan Desantara Foundation juga menciptakan situs www.omahkendeng.org sebagai wadah untuk berbagi informasi kepada masyarakat seputar Pegunungan Kendeng dan juga perkembangan konflik yang sedang berlangsung.

c. Pemasangan atribut tolak pabrik semen

Salah satu bentuk resistensi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) adalah dengan membuat dan memasang atribut berupa spanduk, stiker, vandalisme di jalanan yang berisi pesan penolakan terhadap pabrik semen dan ajakan menyelamatkan Pegunungan Kendeng Utara dari ancaman kerusakan lingkungan. Dalam setiap aksi demonstrasi maupun melakukan audiensi, para peserta aksi juga melengkapi diri dengan atribut penolakan pabrik semen, seperti kaos, poster dan topi yang identik digunakan oleh petani.

Gambar 3.2 Pemasangan Spanduk Tolak Pabrik Semen



Sumber :

http://radarkudus.jawapos.com/imgs/2016/08/2009_18761_DSC_0776.JPG

2. Melakukan aksi demonstrasi

Sebagai bentuk kekecewaan atas sikap pemerintah daerah, baik pada pemerintah kabupaten dan juga provinsi, yang tidak memperhatikan aspirasi dari rakyatnya, masyarakat kontra yang dimotori oleh Jaringan Masyarakat

Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) juga kerap melakukan aksi demonstrasi yang disertai dengan orasi, aksi teatrikal dan doa bersama untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah yang berkuasa. Aksi demonstrasi sudah dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Pati, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, hingga melakukan aksi mengecor kaki di depan Istana Negara. Hasil dari pengamatan di lapangan, aksi demonstrasi oleh JMPPK dilengkapi dengan berbagai atribut tolak pabrik semen seperti kaos, poster, serta menyiapkan sarana prasarana berupa sound sistem untuk berorasi. Mereka juga menyiapkan bekal makanan yang cukup banyak untuk anggota demo.

3. Aktif terlibat dalam setiap agenda dialog/audiensi

Salah satu upaya dari JMPPK dalam menolak pabrik semen adalah dengan melakukan audiensi atau dialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Audiensi ini ada yang inisiatif dari pihak JMPPK sendiri, ada juga yang berasal dari undangan pihak pemerintah dan instansi terkait. Kegiatan audiensi ini dimanfaatkan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Utara untuk menyampaikan berbagai aspirasi dari masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pembangunan pabrik semen. Dalam proses audiensi ini, pihak JMPPK juga mengutarakan fakta-fakta otentik tentang kondisi Pegunungan Kendeng Utara untuk memperkuat aspirasi mereka. Selain itu, mereka juga mempresentasikan apa saja dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pendirian pabrik semen. Akan tetapi, kegiatan audiensi ini tidak pernah benar-benar menjadi dasar pertimbangan bagi pihak perusahaan maupun pemerintah daerah untuk membuat keputusan.

Pada Jumat, 11 Februari 2011, pihak PT. Sahabat Mulia Sakti mengundang beberapa LSM dan juga masyarakat untuk sosialisasi pendirian pabrik semen di Kecamatan Kayen dan Tambakromo yang berlokasi di rumah makan Kembangjoyo. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, orang-orang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) tidak bersedia untuk mengisi daftar hadir dan ikut makan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pendirian pabrik semen di dua kecamatan tersebut (diunduh dari <http://omahkendeng.org>).

Kegiatan audiensi tidak hanya dilakukan sekali duakali, dalam beberapa kesempatan, kegiatan audiensi yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun perusahaan, hanya mengundang sebagian kecil dari pihak kontra yang diwakili oleh JMPPK. Selebihnya adalah undangan kepada LSM-LSM yang memiliki keberpihakan dengan rencana pendirian pabrik semen. Hal ini tidak lantas membuat JMPPK tidak berhenti sampai di situ saja dalam upayanya untuk menolak pabrik semen.

4. Melakukan aksi *long march*

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan Pegunungan Kendeng Utara, dalam mengawal setiap agenda yang berkaitan dengan pabrik semen, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng juga melakukan aksi *long march*. Jarak tempuh terpanjang yang pernah dilakukan oleh JMPPK adalah ketika mengawal sidang putusan di PTTUN Semarang.

Gambar 3.3 Aksi Long March JMPPK



Sumber : <http://facebook.com/jokoprianto>

5. Mengawal sidang Amdal

Salah satu peran yang ditampilkan oleh JMPPK dalam konflik pabrik semen yaitu mengawal jalannya sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Masyarakat kontra yang diwakili JMPPK berusaha menyampaikan berbagai aspirasi dan tuntutan mereka. Mereka bersikeras bahwa pembangunan pabrik semen akan berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup masyarakat serta mengancam lingkungan.

6. Melakukan studi banding

Sebagai langkah untuk semakin memperkuat argumentasi, pihak Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) juga melakukan studi banding secara swadaya. Sebelumnya pihak pabrik semen telah menawarkan akomodasi bagi pihak JMPPK untuk melakukan studi banding di lokasi pabrik

yang berada di Kabupaten Tuban. Akan tetapi, JMPPK khawatir apabila studi banding tersebut difasilitasi oleh pihak pabrik semen, mereka hanya akan ditunjukkan sisi-sisi baik dari adanya pabrik semen. Di samping itu, kelompok masyarakat yang mendapat dampak positif akan lebih ditonjolkan kepada mereka. Sehingga hal ini kemudian membuat JMPPK berinisiatif untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Tuban secara swadaya untuk mendapatkan informasi secara langsung yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Hasil dari studi banding tersebut dijelaskan oleh koordinator JMPPK, yaitu GRN, bahwa sebagian masyarakat sekitar lokasi pabrik menyatakan menyesal telah menyetujui dibangunnya pabrik semen di wilayah mereka. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif yang masyarakat telah rasakan. Misalnya cadangan air yang semakin menurun. Temuan-temuan seperti ini dijadikan alat untuk menguatkan argument JMPPK dalam gerakannya menolak pabrik semen di Kabupaten Pati.

7. Menjalin kerja sama dengan pihak lain

Salah strategi yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng ialah menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka mewujudkan kepentingan dari JMPPK yang mewakili suara masyarakat kontra. Kerja sama tersebut antara lain dijalin dengan Acintyacunyata Speleological Club (ASC) Yogyakarta ketika meneliti kondisi geologis Pegunungan Kendeng Utara, seperti jumlah gua dan mata air. Kemudian kerja

sama dengan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah serta SHEEP Pati.

8. Upaya mencapai resolusi konflik

Dalam rangka untuk dapat menggagalkan rencana pihak perusahaan semen serta pemerintah daerah untuk mendirikan pabrik semen di Kabupaten Pati, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan berbagai upaya untuk menolak rencana tersebut. JMPPK sebagai wadah bagi kelompok masyarakat kontra, berusaha agar apa yang disampaikan oleh masyarakat dijadikan pertimbangan bagi pihak perusahaan dan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Berbagai agenda tentang pabrik semen yang telah mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik tidak mampu menghasilkan solusi yang diinginkan. JMPPK bersikeras bahwa pabrik semen tidak boleh dibangun. Masyarakat tidak membutuhkan pabrik semen, dan merasa cukup dengan mengandalkan hasil pertanian. Sementara pihak perusahaan semen dan juga pemerintah terus berusaha agar pabrik semen dapat dibangun. Secara sederhana, beberapa upaya yang telah dilakukan JMPPK dalam mencapai resolusi yang diinginkan antara lain sebagai berikut:

a. Mediasi

Upaya mediasi pun dilakukan untuk mempertemukan masyarakat kontra dengan perusahaan semen dengan pemerintah daerah sebagai

mediator. Mediasi ini diharapkan mampu untuk menemukan solusi bagi permasalahan yang ada. JMPPK selaku pihak kontra, berusaha mempertahankan argumentasinya dengan memperlihatkan fakta-fakta otentik tentang Pegunungan Kendeng Utara. Akan tetapi aspirasi yang disampaikan oleh JMPPK tidak dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Hal ini terlihat dari sikap pemerintah daerah yang terus mendukung rencana tersebut.

b. Negosiasi Politik

Ketika langkah mediasi dengan perusahaan semen dan pemerintah tidak kunjung menghasilkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat kontra, JMPPK menempuh cara lain yang berkaitan dengan regulasi, yaitu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati. Meskipun tidak sedang berada dalam posisi untuk berunding atau bernegosiasi, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) berusaha menyampaikan aspirasi-aspirasinya ketika dewan legislatif menyelenggarakan rapat dengar pendapat pada 2 Maret 2011, kaitannya untuk perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang baru. JMPPK menginginkan agar di perda yang baru nanti, kawasan Pegunungan Kendeng diubah menjadi kawasan geologi yang harus dilindungi. Sehingga tidak ada alasan untuk bisa menjadikan kawasan tersebut untuk kegiatan penambangan.

Upaya yang dilakukan oleh JMPPK tersebut kembali menghasilkan putusan yang bertolak belakang dengan keinginan mereka. Di dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2010-2030 yang telah disahkan, berisi putusan yang sejalan dengan rencana pendirian pabrik semen. DPRD Kabupaten Pati menetapkan dan mengubah kawasan yang seharusnya untuk pertanian dan pariwisata, menjadi kawasan pertambangan seperti di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Dua kecamatan terakhir adalah calon wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pabrik dan penambangan.

c. Ajudikasi

Di saat konflik masih berlangsung, dan sebagian besar masyarakat yang dimotori oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) masih menyuarakan dengan keras penolakannya terhadap pabrik semen, Pemerintah Kabupaten Pati melalui Badan Lingkungan Hidup, justru telah mengeluarkan Surat Izin Lingkungan kepada pihak perusahaan semen. Surat ini diterbitkan pada 8 Desember 2014 dengan Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Bupati Pati. Keputusan Bupati Pati untuk mengeluarkan surat izin tersebut mendapat protes keras dari masyarakat kontra. Apalagi selama ini Bupati Pati tidak pernah berdialog secara langsung dengan masyarakatnya.

Diterbitkannya surat izin lingkungan tersebut mendapat perhatian serius dari JMPPK. Jika rencana pandirian pabrik semen tersebut tetap dilanjutkan, maka menjadi percuma perjuangan yang telah mereka lakukan sejak Tahun 2010. Strategi yang diambil oleh JMPPK kemudian adalah menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk melawan putusan pemerintah. Tercatat ada Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah dan juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Koordinator JMPPK, GRN, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh JMPPK adalah mencari ahli-ahli hukum yang bersedia membantu secara sukarela. Melalui kerja sama tersebut, kemudian membawa JMPPK melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Di dalam berkas gugatan dengan nomor register perkara 015/G/2015/PTUN SMG tersebut, penggugat mengajukan alasan karena keputusan Bupati Pati bertentangan dengan Undang-undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri ESDM No. 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Selain itu, keputusan Bupati Pati terdapat kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan atau pemalsuan data, dokumen dan atau informasi seperti fakta sebaran lokasi gua di lapangan. Berdasarkan penelitian JMPPK

bersama Acintyacunyata Speleological Club (ASC) Yogyakarta ditemukan 30 gua, 110 mata air dan 9 ponor, sementara di dalam dokumen Amdal perusahaan hanya menyebutkan 10 gua, 29 mata air dan 3 ponor.

Ketika sidang hasil pembacaan putusan, JMPPK beserta kelompok masyarakat kontra lainnya melakukan *long march* dari Kabupaten Pati hingga Kota Semarang yang jaraknya ratusan kilometer untuk mengawal jalannya sidang. Pada akhirnya, hasil sidang oleh hakim memutuskan, memenangkan gugatan yang diajukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dan mewajibkan Bupati Pati untuk mencabut izin lingkungan yang sebelumnya telah dikeluarkan.